

BAB IV

ANALISA

Dalam konteks wacana Islam sekarang, Islam khususnya di Indonesia berangsur-angsur kehilangan naluri sebagai “gerakan sosial”. Gerakan yang mempertautkan proses evolusi masyarakat yang tertikam oleh ambisi politik yang dalam prakteknya banyak mengalami kegagalan. Kesadaran sebagai gerakan sosial ini yang menghilang: gerakan sosial disini penulis artikan sebagai upaya untuk mempertahankan otonomi dan membebaskan diri dari pengaruh, baik negara maupun modal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kalangan kelas bawah yang selama ini dijadikan sapi perah, tidak hanya sampai disitu; kelas bawah selalu saja diberi wacana-wacana yang dapat mengumpulkan nalar kritis mereka atas beberapa fenomena yang kerap melingkupinya sehari-hari. Faktanya, tidak ada wacana yang paling menyentuh kesadaran masyarakat pada tingkatan bawah khususnya Indonesia selain wacana keagamaan. Wacana keagamaan, dalam konteks sekarang ini, kalau tidak menumpulkan kesadaran kritis masyarakat (umatnya) sebaliknya terjebak pada pertarungan gagasan yang melangit, akibatnya kenyataan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sebagai fakta sosial tidak tersentuh sama sekali; parahnya gagasan-gagasan tersebut hanya menjadi hegemoni atau mitos demi mengukuhkan kelas sosial tertentu (dalam pandangan Marx) sehingga kemapanan akan selalu terjaga.

Latar demikian telah dilupakan oleh gagasan besar keagamaan yang diusung oleh jaringan Islam liberal; dengan hanya melakukan kritik deras serta mengutuk pada umat Islam yang tunduk pada otoritas teks. Mereka merasa perlu untuk menyadarkan ummat Islam akan badai perubahan global yang kini secara merata menimbulkan keresahan khususnya pada level masyarakat bawah. Dalam membangkitkan kesadaran tersebut maka yang pertama-tama dilakukan adalah melihat bahwa ajaran agama Islam itu berada dalam konteks situasi historis yang berbeda. Karenanya ajaran agama perlu perbaharuan secara total, termasuk melakukan penggalian kembali pada dasar-dasar keyakinan absolut yang selama ini diajarkan oleh Al Qur'an. Mulailah kemudian dasar-dasar ajaran mendapat kritik: mulai dari bagaimana penghargaan pada kaum perempuan hingga bagaimana sesungguhnya kedudukan dan posisi syari'ah. Tak ada usaha untuk melakukan kritikan pada yang ada diluar teks; dalam artian realitas sosial yang keji atau tatanan struktur global yang memang bertindak diskriminatif. Kaum yang menamai dirinya pembaharu atau lebih spesifik jaringan Islam liberal telah mengulang kembali perangai para mubalig kontemporer, yang meyakini bahwa kekeliruan terletak ada pada diri masing-masing.

Aparatus efektif yang digunakan untuk mendesiminasikan (menyebarkan: mewacanakan) gagasan tersebut adalah media. Media banyak dimanfaatkan oleh mereka dengan menulis artikel sekaligus melakukan polemik yang dijadikan sebagai ajang bertukar pikiran dan bersifat gagasan. Tak urung muncul beberapa insiden yang menimpa sejumlah orang yang mengklaim sebagai jaringan Islam liberal ikut dalam

iklan kenaikan BBM. Ulil Abshar Abdala bersama teman-temannya di freedom institute berusaha dengan pengaruh dan gaya liberalisme pemikirannya mengaitkan rasionalitas kenaikan harga BBM, sehingga bukan saja kenaikan harga BBM menjadi pilihan yang rasional tanpa memandang alternatif lain yang lebih bijak.¹ Mereka percaya kalau kesadaran keagamaan memerlukan pembaharuan. Karena yang dinamakan pembaharuan—kalau merujuk sikap mereka (Jaringan Islam liberal)—adalah tak lain cara untuk membuat pemeluk agama bisa dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan keadaan sosial yang saat ini ada, sehingga tidak sempat mempertimbangkan akibat domino yang diderita lagi-lagi oleh masyarakat pada tingkatan bawah yang secara apriori belum siap akan keputusan tersebut. Pada titik ini gagasan keagamaan yang selalu didesiminasikan oleh kelompok jaringan Islam liberal tidak lebih hanya sebagai fasion wacana dan jauh dari spirit pembebasan; minimal keberpihakan pada kelas-kelas yang didominasi.

Selain itu, dibalik benturan yang keras dengan kapitalisme global maka gerakan Islam khususnya kelompok jaringan Islam liberal bukan berdiri dengan wacana-wacana atau gagasan-gagasan serta sistem tunggalnya, akan tetapi malah ikut larut dan mencampur aduk sistem pendekatan keagamaannya dengan sentuhan-sentuhan keji kapitalisme. Itulah yang menyulut kembali perdebatan tentang komodifikasi agama yang selama ini telah jadi sasaran kritik sejumlah kalangan dan menghanyutkan ajaran Islam dalam pusaran yang kejam. Pada sisi umat Islam pada umumnya, gerakan keagamaan jaringan Islam liberal yang terus menerus berusaha

¹ Eko Prasetyo, *Astagfirullah: Islam Jangan Dijual* (Yogyakarta, Resist Book, 2007), hlm. ix

untuk disebarakan melalui media-media menjadi tidak sebegitu sensitif dengan isu-isu sosial; sedangkan pada sisi masyarakat, gerakan tersebut bertanggung jawab atas manipulasi kesadaran. Upaya perbaikan melalui proses ‘liberalisasi’ gagal karena dilihat sebagai arus pandangan yang membawa pesan ideologis yang busuk dan sengaja diciptakan oleh sebuah sistem yang lama.²

Terlampau lama wacana keagamaan dibiarkan untuk tidak bersentuhan dengan realitas sosial yang sebenarnya telah mengkarantina ajaran agama hanya sebagai fasion wacana yang melangit sehingga menina bobokkan atau dengan mengambil istilah Marx sebagai candu yang membuat masyarakat merasa seolah aman, tentram padahal sebaliknya menciptakan hegemoni dan kesadaran palsu yang mengeram di dalam dasar kesadaran masyarakat, itu yang disebut Rouger Groudy, filosof Perancis sebagai agama opium sehingga hanya terbatas fungsinya sebagai pembius individu dan masyarakat.³ Roger Graudy menyebut kondisi ini timbul jikalau; *Pertama*, ketika orang beragama percaya kalau arah menuju Tuhan menghendaki untuk lari dari problem-problem kehidupan dan konflik-konflik sejarah. *Kedua*, bila upaya mencari Tuhan dalam keadaan lemah, bodoh dan goncang. Ini muncul melalui pengetahuan sekaligus tingkat aksi politik. *Ketiga*, jika agama mengambil bentuk ideologis atau aliran resmi. Ketiga situasi itulah yang kemudian

² Jaringan Islam liberal terus menerus dikutuk karena disebut sebagai kekuatan kaki tangan dari negara-negara barat. Kebetulan sekali ada lembaga donor yang antusias membiayai sebagian dari program-program mereka. Terlebih-lebih program dari komunitas jaringan Islam liberal terus menerus berputar hanya pada arus wacana yang melangit dengan menggunakan tenaga intelektual yang berasal muasal dari kelas menengah, lihat Eko Prasetyo,....hlm. 10

³ Muhsil al Mayli, *Pergulatan Mencari Iman: Perjalanan Religius Roger Groudy* (Jakarta, Paramadina, 1996), hlm. 17

mengantar agama dalam pasungan kepentingan-kepentingan diluar ummat. Agama menjadi kiblat pelarian dari sekawanan orang yang tertekan oleh impitan kehidupan.

Banyak ditemukan indikasi dalam tingkatan empiris, bagaimana gagasan-gagasan keagamaan dengan arus pemikiran liberalisnya hanya berhenti pada 'hanya' sekedar gagasan tanpa berakibat langsung dengan situasi sosial masyarakat yang kian runyam atau melakukan keterlibatan praksis pembebasan dengan melakukan pembelaan kepentingan masyarakat tingkatan bawah yang sering, bahkan terlalu sering mengalami akibat-akibat langsung, baik dari kebijakan-kebijakan negara maupun institusi keagamaan, semacam MUI (Majelis Ulama' Indonesia), dengan secara implisit hanya memapankan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.⁴

Dalam gagasan keagamaan (yang secara panjang lebar telah diurai dalam bab terdahulu) Dalam soal pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi, kelompok jaringan Islam liberal menggarisbawahi bahwa 'Islam' yang riil dalam sejarah dan diekspresikan manusia sangat banyak ragamnya, bahkan tidak terbatas. Antara berbagai jenis Islam dan warna-warni Islam yang amat beragam sebaiknya saling memahami dan toleransi. Perbedaan dan keragaman harus disikapi secara damai, bukan dengan cara kekerasan. Sebagai mazhab 'pemikiran'/gerakan agama (Islam)

⁴ Negara memprakarsai pembentukan MUI sebagai salah satu cara untuk menaklukkan potensi politik dan upaya untuk menyeragamkan semua keragaman ummat. Dengan antusias MUI kemudian jadi 'alat' negara yang tidak pernah melakukan tindakan politik kecuali menyetujui semua inisiatif pemerintah. Fungsi regulatif negara kemudian dibantu oleh sejumlah gerakan agama melalui penetapan berbagai aturan yang seakan-akan membantu fungsi layanan rohani pabi publik. Antara lain; UU pendidikan, UU pornografi merupakan kebijakan nasional yang berusaha mencari 'muka' pada gerakan agama. Perda syari'ah juga mulai giat diberlakukan untuk mencegah moralitas publik yang kian mencemaskan. MUI juga 'berani' mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan moralitas; akan tetapi tidak cukup berani untuk mengeluarkan fatwa mati bagi yang terbukti terlibat dengan korupsi, misalnya.

dan kebudayaan yang cukup luas, ternyata wacana jaringan Islam liberal juga cukup kental dengan nuansa politik. Hal ini terasa dari wacana sekularisme yang dilansir oleh Nur Khalik Madjid dalam hubungannya dengan demokrasi (Negara sekular).

Dalam negara sekuler, nilai-nilai agama (tertentu) yang dianggap universal dan bisa diterima oleh pemeluk agama yang lain atau bisa diterima manusia secara umum bisa diadopsi dalam institusi negara, akan tetapi dengan memakai retorika bahasa yang umum, bukan bahasa khas agama yang bersangkutan. Meskipun demikian, negara sekuler, gerakan sekularisasi, dan sekularisme, baik dalam dataran konsep maupun praktik riil dalam sejarah kadang (atau bahkan seringkali?) terjebak pada tindakan “kekerasan” (dalam arti yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya), misalnya kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap entitas agama, hukum adat, kultur lokal, dan seterusnya seperti yang terjadi dalam beberapa kasus pada akhir-akhir ini; salah satunya dengan kasus Ahmadiyah.

Justru karena sangat gigih melansir wacana sekularisme dan demokrasi, gerakan pewacanaan jaringan Islam liberal dalam sisi-sisi tertentu tampaknya terjebak melakukan “kekerasan”, sebuah nilai yang ditentang oleh jaringan Islam liberal sendiri. Inilah salah satu paradoks dari gagasan pewacanaan jaringan Islam liberal. Kekerasan yang dimaksud adalah ketika jaringan Islam liberal mencoba melakukan upaya “peminggiran (atau bahkan penyingkiran!) ‘Islam’ dari wilayah publik”, bahkan lebih dari itu jaringan Islam liberal melakukan upaya ‘privatisasi’ Islam. Bukankan dengan dua upaya ini berarti jaringan Islam liberal melakukan “kekerasan” terhadap ‘Islam’ itu sendiri.

Perdebatan tentang wacana sekularisme dan demokrasi adalah sebuah perbincangan tentang agama (Islam) kaitannya dengan politik, negara, pemerintahan, dan bangsa. Dan, tampaknya dalam persoalan ini, mazhab jaringan Islam liberal akan “menendang” dan “mengusir” jauh-jauh entitas agama dari wilayah publik, politik, negara, pemerintahan, bahkan bangsa.

Selain itu, para eksponen jaringan Islam liberal seringkali terjebak pada semangat berlebihan, sehingga tampak mengidap arogansi karena menganggap komunitas jaringan Islam liberal jauh lebih baik dan lebih superior dari “yang lain”. Nada-nada seperti: “Islib, demokrasi, dan teologi negara sekuler merupakan evolusi tertinggi dan final peradaban manusia”, “masa depan umat manusia tidak bisa lain kecuali jaringan Islam liberal”, “harus demokrasi, harus liberal”, dan semacamnya.

Hal itu menunjukkan bahwa gagasan pewacanaan jaringan Islam liberal terjebak melakukan upaya universalisasi dan totalisasi. Padahal, sebagaimana ditunjukkan dan diungkap oleh buku Agama Kolonial, gagasan jaringan Islam liberal mengidap banyak cacat, kelemahan, dan bias, bahkan sejak dari asumsi dasar, bangunan ‘pemikiran’, dan epistemologinya.